

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN GUNA MENDUKUNG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO

Siti Rahma Karnisha Mooduto

NPP. 32.0969

Asal Pendaftaran Kota Gorontalo

Program Studi Studi Kepependudukan dan Pencatatan Sipil

Email : karnisaamooduto@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ida Yunari Ristiani, SKM, MM

ABSTRACT

Problem/Backround (GAP): This research was motivated by the inaccuracy of data from the Population and Civil Registration Service of Gorontalo City in the process of distributing PKH social assistance at the Gorontalo City Social Service. **Purpose:** to analyze the obstacles and efforts to utilize population data to support the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Gorontalo City. **Method:** the research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies. **Result/Findings:** the results of the study indicate that in the implementation of population data utilization in Gorontalo City there are several obstacles that occur, one of which is the lack of public awareness to update data which makes it difficult for the Social Service to identify Beneficiary Families of the Family Hope Program, especially in the process of identifying and verifying beneficiary families as well as PKH program assistants who still commit fraud in the data collection process. As for the efforts that can be given, one of the efforts of the Population and Civil Registration Service to overcome obstacles is to increase the intensity of socialization and coordination with the community. **Conclusion:** the use of population data is very important for the success of PKH in Gorontalo City. Although there have been efforts, data accuracy and integration are still jobs that need to be seriously improved. **Suggestions:** to encourage strengthening coordination and integration of information systems between Disdukcapil, the Social Service, and other related parties to ensure that population data used for PKH is always accurate, up-to-date, and comprehensive.

Keywords : Population Data, Family Hope Program, Poverty

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakakuratan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dalam proses penyaluran bantuan sosial PKH di Dinas Sosial Kota Gorontalo. **Tujuan:** untuk menganalisis bagaimana upaya pemanfaatan data kependudukan guna mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gorontalo. **Metode:** menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:** menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan di

Kota Gorontalo ada beberapa hambatan yang terjadi salah satunya adalah kesadaran masyarakat yang kurang untuk melakukan update data yang membuat Dinas Sosial kesulitan untuk mengidentifikasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan terutama dalam proses identifikasi dan verifikasi keluarga penerima manfaat juga pada pendamping program PKH yang masih melakukan kecurangan dalam proses pendataan. Adapun upaya yang dapat diberikan, salah satu upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengatasi hambatan adalah meningkatkan intensitas sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat. **Kesimpulan:** Pemanfaatan data kependudukan sangat penting bagi keberhasilan PKH di Kota Gorontalo. Meskipun telah ada upaya, akurasi dan integrasi data masih menjadi pekerjaan yang perlu ditingkatkan secara serius. **Saran:** mendorong penguatan koordinasi dan integrasi sistem informasi antara Disdukcapil, Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan data kependudukan yang digunakan untuk PKH selalu akurat, mutakhir, dan komprehensif.

Kata Kunci : Data Kependudukan, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan: jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut ketaqwaan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. (Gatiningsih, n.d.) Data kependudukan yang akurat sangat penting untuk kepentingan penduduk. Apabila data kependudukan tidak akurat, maka akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan dan sasaran program pemerintah yang ditujukan kepada penduduk. Pemanfaatan data kependudukan merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat demokrasi.

Dr. Muhadam Labolo dalam bukunya menekankan bahwa pemerintahan adalah gejala yang tak terhindarkan dan hadir untuk mengelola kehidupan bersama guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Dalam konteks ini, tujuan pemerintahan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program bantuan sosial seperti PKH. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah memerlukan informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi masyarakatnya. Di sinilah data kependudukan memainkan peran krusial. (Labolo Muhadam, 2014). Data kependudukan sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan, diantaranya para pembuat kebijakan, kalangan pendidikan dan masyarakat secara umum, karena data tersebut sangat penting dalam mengelola kependudukan dan menanggulangi permasalahan kependudukan yang terjadi. Kebutuhan akan data dan informasi kependudukan semakin hari akan semakin dibutuhkan karena semakin cepatnya perubahan karakteristik penduduk yang terjadi. Informasi kependudukan tidak akan terlepas dari persoalan yang berkaitan dengan sumber data kependudukan. (Hutasoit, 2016)

Di antara masalah strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Gorontalo adalah tingginya angka kemiskinan. Pemerintah Kota Gorontalo menaruh perhatian besar terhadap tingkat kemiskinan, menyadari dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, tingkat kemiskinan menjadi indikator krusial dalam menilai keberhasilan dan efektivitas program pembangunan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Kota Gorontalo pada periode 2016-2024 mengalami perubahan yang tidak menentu atau tidak stabil, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Dalam kurun waktu tersebut, penurunan tingkat kemiskinan paling signifikan terjadi pada tahun 2018 dan 2019, yakni turun sebesar 0,35 persen poin dibandingkan tahun 2017. Sementara itu, peningkatan kemiskinan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 (naik 0,34 persen poin), dimana merupakan efek dari adanya pandemi Covid-19. Pada periode 2022-2023 tingkat kemiskinan di Kota Gorontalo menurun, dan sedikit meningkat di tahun 2024. Jumlah penduduk miskin di Kota Gorontalo pada tahun 2024 mencapai 12,97 ribu orang. Dibandingkan tahun 2023, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan kurang lebih 350-an orang. Persentase penduduk miskin pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,74 persen, meningkat 0,1 persen poin terhadap tahun 2023.

Di tingkat global, dampak potensial COVID-19 menimbulkan tantangan nyata bagi tujuan suatu Negara untuk mengakhiri kemiskinan. COVID-19, memiliki potensi besar untuk menyebabkan atau memperparah kemiskinan melalui berbagai saluran. Dampaknya bisa sangat luas dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. (Sumner et al., 2020)

Hal ini menunjukkan perlunya mencermati dan mengkaji ulang strategi program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta faktor yang mungkin mempengaruhi kemiskinan di Kota Gorontalo dalam memerangi kemiskinan dan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah Kota Gorontalo dalam menangani kemiskinan belum efektif atau berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Masih banyak faktor yang mempengaruhi atau kendala yang ada dimana harus segera di tangani agar segala kebijakan atau program yang telah disusun atau direncanakan dapat berjalan dengan efektif. Permasalahan penduduk miskin di Kota Gorontalo antara lain peningkatan jumlah penduduk miskin, pengelolaan dan pengumpulan serta verifikasi atau sinkronisasi data jumlah penduduk miskin di tingkat kecamatan juga masih memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya tidak memadai dan keterampilan yang buruk, jumlah penduduk yang sangat terbatas, rumah tangga dengan tingkat kemiskinan kesehatan gizi yang rendah, kemampuan rumah tangga miskin untuk menyekolahkan anaknya sangat terbatas, partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengentasan kemiskinan masih kurang dan integrasi atau koordinasi antar pemangku kepentingan pengentasan kemiskinan akan mengarah pada optimalisasi program, apalagi koordinasi yang optimal antara Pemerintah Kabupaten dan Kota. Adapun upaya pemerintah Kota Gorontalo dalam pengentasan kemiskinan yang semakin meningkat, salah satunya yaitu melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mempunyai tujuan untuk menekan angka kesmiskinan yang terjadi di Kota Gorontalo dengan memanfaatkan data kependudukan.

Berdasarkan berita Provinsi Gorontalo yang ditulis oleh Nova pada tanggal 27 Juni 2020 dengan judul artikel “Sekda Provinsi Minta Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi acuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial”. Bahwa data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harusnya menjadi acuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menurut Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang menjadi rujukan penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan maupun dalam penyaluran bantuan sosial masih menjadi persoalan yang sering dihadapi selama ini, karena tidak terintegrasi dengan baik. Seharusnya DTKS disesuaikan dengan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurutnya data yang berkelanjutan itu adalah data milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena data tersebut tidak tumpang tindih, sudah jelas nama dan NIK nya, juga dapat menunjukkan profil setiap penduduk, seperti pendidikan hingga status pekerjaannya.

Validasi ataupun sinkronisasi data jumlah penduduk miskin dalam program keluarga harapan (PKH) di Kota Gorontalo memerlukan penelitian yang mendalam, bersifat komprehensif sehingga untuk mengatasi permasalahan validasi ataupun sinkronisasi data jumlah penduduk miskin perlu dibangun strategi-strategi yang tepat yang bertujuan sebagai pengentasan kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial dan budaya yang ada pada masyarakat, memotivasi masyarakat untuk hidup efisien dan berhasil memajukan masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Meskipun urgensi data kependudukan yang akurat untuk keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) telah banyak disadari dan beberapa penelitian telah menyoroti tantangan pengelolaan data dalam program bantuan sosial, Faktor petugas pendamping PKH adalah ujung tombak dalam verifikasi lapangan. Mereka berinteraksi langsung dengan keluarga penerima manfaat, mengumpulkan informasi, dan seringkali menjadi pihak pertama yang mengetahui perubahan status keluarga. Meskipun mereka sering melaporkan kesulitan dengan data yang tidak valid atau usang dari basis data pusat, belum banyak penelitian yang menganalisis secara mendalam bagaimana kompetensi, pelatihan, dan dukungan teknologi yang diberikan kepada pendamping PKH memengaruhi kualitas verifikasi data kependudukan di lapangan.

Minimnya Kesadaran Masyarakat dalam Pembaruan Data Kependudukan. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai layanan untuk pembaruan data kependudukan (seperti kelahiran, kematian, pindah alamat, atau perubahan status perkawinan), tingkat kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk secara proaktif memperbarui data mereka masih rendah. Hal ini terutama berlaku bagi keluarga miskin yang mungkin menghadapi hambatan akses, biaya, atau kurangnya informasi mengenai pentingnya pembaruan data bagi program seperti PKH.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemanfaatan data maupun mengenai Program Keluarga Harapan. Penelitian Arif Sofianto

yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan di Jawa Tengah menemukan bahwa PKH berdampak positif terhadap rumah tangga sangat miskin dalam kesehatan dan pendidikan (aksesibilitas), namun belum terhadap status sosial ekonomi. Temuan penting lainnya adalah dampak PKH masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok, atau yang disebut sebagai perilaku ekonomi subsistem. Bantuan digunakan untuk kebutuhan makanan pokok serta kebutuhan rumah tangga lainnya. (Sofianto, 2020). Penelitian Ezra Viranny Manoppo dan Nandika Aditya Laoh berjudul Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Rs-Rtlh Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara menemukan masih ada keluarga yang sudah mampu namun masih terdaftar dalam DTKS, begitupun sebaliknya yakni keluarga yang layak dibantu namun tidak terdaftar dalam DTKS. Kendala ini dikarenakan update data dari pemerintah kabupaten/ kota yang cenderung tidak rutin. (Manoppo & Laoh, 2022). Penelitian Aulia Sundari dan Fitri Eriyanti yang berjudul Pemanfaatan Bantuan Global Positioning System (GPS) Oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan di Jorong Pasia Tiku Kabupaten Agam yang memperoleh hasil GPS ini tidak dapat diperbaiki jika rusak dikarenakan mekanik untuk memperbaiki alat bantu GPS di Sumatera Barat ini belum ada. Oleh karena itu belum tercapai tujuan yang maksimal dari pemberian bantuan ini, (Sundari & Eriyanti, 2019). Penelitian Nia Giant Virnanda Agustina dan Yusuf Hariyoko yang berjudul Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Perencanaan Kelurahan Kedung Baruk yang memperoleh hasil Data yang diperoleh dari aparat pemerintah Kelurahan Kedung Baruk dengan implementasi program yang telah dilaksanakan cukup baik, Tetapi pembaharuan data masih sangat diperlukan, untuk menentukan arah prioritas perencanaan pembangunan, dikarenakan setiap tahunnya keadaan kependudukan akan terus berubah. (Agustina & Yusuf Hariyoko, 2024).

Penelitian Nurinda Ibrahim, Ramli Mahmud, Sastro M. Wantu yang berjudul Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, temuan penelitian mengungkapkan adanya masalah dalam ketepatan pelayanan. Beberapa penerima PKH tidak sesuai dengan kategori penerima yang seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan pelayanan pemerintah terhadap calon peserta PKH tidak berjalan efektif. (Ibrahim, 2023). Penelitian oleh Nainta Agustanta, Titis Dewi Anggalini yang berjudul *Assessing the Effectiveness of Social Assistance Programs to Alleviating Poverty in Indonesia* yang memperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia adalah variabel Rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita penduduk untuk pembelian barang bukan makanan, dan jumlah desa yang memiliki fasilitas kesehatan yaitu aspek kesehatan dengan nilai koefisien (R^2) sebesar 0,89 atau 89%. Dimana bantuan sosial efektif dalam enurunkan tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan keuangan secara langsung kepada keluarga miskin. (Agustanta et al., 2024).

Penelitian oleh Faraz V Shahidi, Chantel Ramraj, Odmaa Sod-Erdene, Vincent Hildebrand dan Arjumand Siddiqi yang berjudul *The Impact of Social Assistance Programs on Population Health: A Systematic Review of Research in High-Income Countries* yang memperoleh hasil bahwa bukti tentang dampak kesehatan dari bantuan sosial masih belum merata. Evaluasi yang ketat terhadap program-program ini sangat kurang. Hanya sedikit penelitian yang memperhitungkan perbedaan sistematis antara penerima bantuan sosial dan rekan-rekan mereka yang bukan penerima. Lebih sedikit lagi yang mengadopsi metode dan

desain penelitian terkuat yang tersedia untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kesehatan.(Shahidi et al., 2019). Penelitian oleh Neeru Gupta, Pascal Zurn, Khassoum Diallo dan Mario R Dal Poz yang berjudul *Uses of Population Census Data For Monitoring Geographical Imbalance in the Health Workforce: Snapshots From Three Developing Countries* yang memperoleh hasil bahwa ketersediaan data yang relevan dengan isu tenaga kesehatan dalam kegiatan pengumpulan data berkala tersebut, sebagai bagian dari penguatan sistem informasi kesehatan nasional, termasuk pemrosesan pekerjaan dan variabel lainnya melalui penggunaan klasifikasi standar internasional pada tingkat detail yang semaksimal mungkin.(Gupta et al., 2003)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu dimana fokus penelitian yang dilakukan mengenai pemanfaatan data kependudukan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gorontalo. Pada penelitian-penelitian sebelumnya tidak spesifik membahas mengenai pemanfaatan data untuk penyaluran bantuan sosial melainkan pemanfaatan data untuk tujuan lain contohnya penelitian sebelumnya oleh Agustina dan Yusuf Hariyoko mengenai pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan kelurahan Kedung Baruk. Adapun penelitian yang dilakukan Arif Sofianto mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) membahas mengenai implelementasi PKH itu sendiri tetapi pada penelitian ini difokuskan pada data penduduk penerima program bantuan sosial. Penelitian ini mengangkat permasalahan yang sering terjadi di masyarakat mengenai rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan update data kependudukan.

Selain itu indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan pendapat dari Chin and Todd (1995) mengenai pemanfaatan dimana ada tiga dimensi yakni menjadikan pekerjaan lebih mudah, bermanfaat dan menambah produktifitas. Penelitian sebelumnya oleh Arif Sofianto (2020) yang menggunakan teori George Edward III mengenai implementasi kebijakan. Penelitian Penelitian Ezra Viranny Manoppo dan Nandika Aditya Laoh (2022) menggunakan teori Strategi menurut Wheelen dan Hunger (2004). Penelitian Nia Giant Virnanda Agustina dan Yusuf Hariyoko menggunakan teori perencanaan. Penelitian Nurinda Ibrahim, Ramli Mahmud, Sastro M. Wantu (2024) menggunakan dengan dimensi kemiskinan menurut Widodo (2006). Hasil penelitian ini tidak hanya memotret bagaimana hubungan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial tetapi juga menggambarkan perilaku pendamping PKH dalam proses penyaluran bantuan sosial.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses, hambatan serta upaya pemanfaatan data kependudukan guna mendukung PKH di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

II. METODE

Metode yang digunakan yakni metode kualitatif yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.(Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan selama 15 hari penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan. Menurut Fernandes Simangunsong (2016:194) dalam penelitian kualitatif informan menjadi sangat penting, bukan hanya sekedar memberikan respons, melainkan juga sebagai pemilik informasi yang akurat dan dianggap mampu memberikan informasi yang menyeluruh. Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam suatu penelitian. *Purposive sampling* juga disebut dengan *judgment sampling*, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan kepada penilaian (*judgment*) penulis mengenai siapa saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. Penelitian yang pengambilan sampelnya menggunakan teknik ini dituntut harus mempunyai latar belakang pengetahuan yang baik agar diperoleh sampel yang sesuai dengan karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Dengan *purposive sampling* diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dijalankan.(Ummah, 2019). Adapun analisisnya menggunakan teori pemanfaatan (Chin & Todd, 1995) dengan tiga dimensi yakni menjadikan pekerjaan lebih mudah, bermanfaat dan menambah produktifitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah masalah Ekonomi yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat salah satunya adalah kemiskinan. Dalam konteks pemanfaatan data kependudukan guna mendukung Program Keluarga Harapan (PKH), penting untuk memahami peran strategis data ini dalam meningkatkan efektivitas dan akurasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Data kependudukan yang akurat dan mutakhir tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan program, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran. Pemanfaatan Data Kependudukan sangat penting dalam mendukung program-program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin dan rentan. Untuk mencapai tujuan ini, pemanfaatan data kependudukan yang komprehensif menjadi sangat krusial. Data ini mencakup informasi mengenai jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan spesifik dari setiap keluarga penerima manfaat. Data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, struktur keluarga dan kondisi ekonomi dalam mengidentifikasi keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria penerima PKH. Berbagai bentuk upaya telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Gorontalo selaku pelaksana dari Program Keluarga

Harapan (PKH) dalam menangani permasalahan pemutakhiran data dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), salah satunya adalah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang penulis dapatkan di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai Pemanfaatan Data Kependudukan Guna Mendukung Program Keluarga Harapan di Kota Gorontalo yang dianalisis dengan menggunakan teori kemanfaatan dari Chin and Todd (1995):

3.1 Menjadikan Pekerjaan Lebih Mudah

1. Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) adalah proses yang krusial untuk memastikan bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran. Pendataan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Tujuan Utama pendataan adalah untuk mengidentifikasi keluarga yang memenuhi syarat sebagai penerima PKH, yaitu keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Di Kota Gorontalo proses pendataan KPM sudah dijalankan sesuai prosedur, namun masih saja ditemukan masalah dalam proses pendataan yaitu manipulasi data KPM yang dilakukan oleh pendamping PKH. Mereka bisa saja memasukkan individu yang tidak memenuhi syarat ke dalam daftar penerima. Potensi kecurangan ini menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan dan efektivitas program bantuan di Kota Gorontalo. Pendamping PKH memiliki akses dan peran krusial dalam proses verifikasi dan validasi data di lapangan. Potensi kecurangan muncul ketika mereka memanfaatkan posisi ini untuk tujuan pribadi atau kelompok, Masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, akan kehilangan kepercayaan terhadap program pemerintah dan institusi yang menjalankannya.

2. Validasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Sejauh ini Dinas Sosial Kota Gorontalo telah berupaya untuk mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam melakukan validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Proses validasi tidak berhenti setelah bantuan disalurkan. Pengawasan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada penyelewengan. Evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Validasi data KPM PKH adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran. Dengan validasi yang akurat, diharapkan program PKH dapat memberikan dampak yang maksimal bagi keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Validasi data yang akurat dan berkala sangat penting untuk memastikan program bantuan sosial berjalan efektif dan efisien. Dengan validasi yang baik, bantuan dapat disalurkan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, sehingga tujuan program dapat tercapai. Validasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan proses penting dalam semua jenis Program Bantuan Sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi

nyata keluarga. Juga mencegah penyalahgunaan bantuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bantuan sosial.

3.2 Bermanfaat

1. Identifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Identifikasi keluarga penerima manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gorontalo adalah fondasi penting yang menentukan keberhasilan program secara keseluruhan. Tanpa proses identifikasi yang akurat dan tepat sasaran, tujuan mulia PKH untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan akan sulit tercapai. Identifikasi yang baik memastikan bahwa bantuan PKH diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Berikut ini jumlah keluarga yang terdaftar dalam DTKS tahun 2024 dan jumlah penerima PKH di Kota Gorontalo:

Jumlah Keluarga Terdaftar dalam DTKS 2024

KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH INDIVIDU
(1)	(2)	(3)	(4)
KOTA BARAT	Dembe I	1056	3101
	Lekobalo	920	2747
	Pilolodaa	492	1424
	Buliide	726	2198
	Tenilo	665	1947
	Molisipat W	628	1659
	Buladu	710	1924
	Total	5197	15000
KOTA SELATAN	Biawao	341	893
	Biawu	769	2127
	Limba B	916	2292
	Limba U I	629	1497
	Limba U II	706	1789
	Total	3361	8598
KOTA UTARA	Dembe II	491	1354
	Wongkaditi Timur	929	2761
	Wangkaditi Barat	335	957
	Dulomo Selatan	860	2278
	Dulomo Utara	629	1774
	Dembe Jaya	630	1837
	Total	3874	10961
DUNGINGI	Huangobotu	1260	3535
	Libuo	929	2479
	Tomulabutao	565	1605
	Tuladenggi	604	1591
	Tamulabutao	673	1869

	selatan		
	Total	4031	11079
KOTA TIMUR	Heledulaa Utara	807	2092
	Heledulaa Selatan	466	1226
	Ipilo	931	2488
	Moodu	853	2449
	Padebuolo	860	2305
	Tamalate	692	2016
	Total	4609	12576
KOTA TENGAH	Wumialo	769	2158
	Dulalowo	543	1513
	Liluwo	712	1865
	Pulubala	533	1305
	Paguyaman	454	1211
	Dulalowo Timur	544	1521
	Total	3555	9573
SIPATANA	Tangikiki	485	1311
	Tapa	762	2044
	Bulotadaa Barat	1011	2926
	Bulatadaa Timur	598	1640
	Molosipat U	650	1760
	Total	3506	9681
DUMBO RAYA	Leato Utara	653	1895
	Leato Selatan	729	2120
	Talumolo	1245	3581
	Botu	564	1641
	Bugis	1058	2815
	Total	4249	12052
HULONTHALANGI	Tanjung Kramat	329	1095
	Pohe	660	1890
	Tenda	1037	2826
	Donggala	789	2231
	Siendeng	745	2009
	Total	3560	10051
	Total Keseluruhan	35942	99531

Jumlah Penerima PKH di Kota Gorontalo 2024

KECAMATAN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TOTAL
DUMBORAYA	841	852	840	658	3191
DUNGINGI	797	795	789	554	2935
HULONTHALANGI	725	726	721	529	2701
KOTA BARAT	1163	1167	1149	831	4310
KOTA SELATAN	533	541	502	381	1957

KOTA TENGAH	606	605	595	421	2227
KOTA TIMUR	829	850	809	597	3085
KOTA UTARA	748	807	785	574	2914
SIPATANA	650	650	646	473	2419
TOTAL	6892	6993	6836	5018	25373

Berdasarkan tabel diatas ada total 25.373 penerima PKH di Kota Gorontalo tahun 2024 yang dibagi menjadi 4 tahap setiap tiga bulan dalam satu tahun dimana penerima PKH terbanyak berada di Kecamatan Kota Barat dan yang paling sedikit di Kecamatan Kota Selatan.

2. Efisiensi Proses Penyaluran Bantuan

Permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan PKH terlihat pada pendataan RTSM yaitu pemberian bantuan tersebut tidak tepat sasaran di karenakan penerima bantuan tersebut hanya yang memiliki hubungan dengan kader yang mendata kalau ada hubungan kekeluargaan maka ia bisa diusulkan sebagai calon penerima bantuan PKH. Pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data yang akurat dari berbagai sumber yakni DTKS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempercepat proses verifikasi dan validasi data penerima. PKH juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial, bank penyalur, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang baik antar instansi ini sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar. Pendamping PKH memainkan peran penting dalam memastikan KPM memahami hak dan kewajiban mereka, serta membantu mereka dalam proses pencairan dana. Pendampingan yang efektif dapat mengurangi risiko kesalahan pencairan dan memastikan bantuan digunakan untuk tujuan yang benar. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gorontalo, seperti halnya di daerah lain di Indonesia, menghadapi tantangan dalam memastikan ketepatan sasaran. Alih-alih menyasar keluarga yang paling membutuhkan, bantuan PKH justru diberikan berdasarkan hubungan kekeluargaan dengan kader pendata. Ini berarti, jika seseorang memiliki koneksi atau ikatan keluarga dengan kader yang melakukan pendataan, mereka berpotensi besar untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan PKH, terlepas dari kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya. Fenomena ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga melemahkan tujuan utama PKH untuk mengentaskan kemiskinan secara merata.

3.3 Menambah Produktivitas

1. Peningkatan Ketersediaan Data

Proses yang dilakukan melibatkan integrasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Dinas Sosial. Integrasi ini bertujuan untuk menyinkronkan dan memadankan data, sehingga diperoleh informasi yang komprehensif dan akurat tentang calon penerima PKH. Dukcapil Kota Gorontalo secara aktif melakukan pemutakhiran data kependudukan secara rutin. Pemutakhiran ini mencakup perubahan status kependudukan, seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Peningkatan ketersediaan data merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program-

program pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Ketersediaan data yang memadai memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran, perencanaan program yang lebih efektif, dan evaluasi yang lebih akurat. Dalam konteks PKH, data yang baik membantu menentukan siapa saja yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

2. Peningkatan Akses Data

Akses data kependudukan memudahkan proses verifikasi data penerima PKH. Hal ini mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan dan memastikan bantuan diterima oleh yang berhak. Penggunaan teknologi informasi seperti basis data kependudukan yang terintegrasi dapat memudahkan akses dan pengelolaan data yakni Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pada dasarnya Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya agar penyaluran bantuan sosial khususnya PKH di Kota Gorontalo itu berjalan lancar dan tepat sasaran. Tetapi bukan hanya dari Dinas Sosial tetapi tetap membutuhkan bantuan dari pihak lain termasuk pendamping PKH maupun masyarakat agar program ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk mengatasi tantangan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran PKH, akses data kependudukan menjadi kunci. Kemudahan akses ini memfasilitasi proses verifikasi data penerima PKH secara lebih akurat, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan dan memastikan bantuan diterima oleh yang berhak. Penggunaan teknologi informasi, khususnya basis data kependudukan yang terintegrasi seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sangat penting dalam memudahkan akses dan pengelolaan data. Dengan SIAK, validasi data penerima PKH dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, meminimalkan potensi kesalahan atau manipulasi.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemanfaatan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) secara signifikan membantu mengurangi kesalahan pendataan dan duplikasi penerima PKH. Hal ini memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria kemiskinan dan rentan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah dipadankan dengan data kependudukan. Sama halnya dengan temuan penelitian yakni Pemanfaatan data kependudukan merupakan suatu proses penggunaan dokumen atau data kependudukan yang merupakan hasil dari pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil melalui sistem informasi administrasi kependudukan kepada lembaga pengguna yang diberikan akses oleh menteri. Kuantitas dan kualitas penduduk suatu negara menjadi suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan, sehingga dalam melakukan rencana pembangunan perlu adanya tinjauan lebih dalam mengenai kondisi penduduk melalui data kependudukan. (Agustina & Yusuf Hariyoko, 2024)

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya terdapat pada objek penelitian dimana penulis menjadikan Program Keluarga Harapan sebagai tujuan dari pemanfaatan data kependudukan sedangkan penelitian sebelumnya menjadikan Pembangunan Program Desa Keluarga Berencana sebagai tujuan pemanfaatan data kependudukan. (Pandjaitan, 2020)

IV. KESIMPULAN

Proses Pemanfaatan Data Kependudukan Guna Mendukung PKH di Kota Gorontalo masih belum optimal khususnya pada dimensi menjadikan pekerjaan lebih mudah yakni menghadapi tantangan dalam pendataan KPM akibat manipulasi data dan isu ketidaktepatan sasaran, terutama karena faktor kedekatan dengan kader pendata. Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan untuk PKH juga masih rendah akibat kurangnya sosialisasi dan kekhawatiran akan privasi data. Meskipun Dinas Sosial telah berupaya melakukan validasi dan menyadari pentingnya identifikasi KPM yang tepat, perbaikan mendasar dalam pendataan, transparansi, dan sosialisasi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas program dan mencapai tujuannya dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan pada dimensi bermanfaat dan menambah produktivitas sudah dijalankan dengan baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian memiliki keterbatasan yang utama yaitu waktu dan penelitian. Penelitian hanya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis sangat menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama dengan waktu yang cukup untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Sosial dan semua pihak yang ikut serta membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian sampai pada proses penyelesaian penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustanta, N., Dewi Anggalini, T., Septiningrum, L., & Dewanti, P. (2024). Assessing the Effectiveness of Social Assistance Programs to Alleviating Poverty in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2024(166), 511–521. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i7.15526>
- Agustina, N. G. V., & Yusuf Hariyoko. (2024). Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Perencanaan Kelurahan Kedung Baru. *Policy and Maritime Review*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.30649/pmr.v3i1.55>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Chin, W. W., & Todd, P. A. (1995). On the use, usefulness, and ease of use of structural equation modeling in mis research: A note of caution. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 19(2), 237–246. <https://doi.org/10.2307/249690>
- Gatiningsih, G. (n.d.). IDENTIFIKASI DATA BASE KEPENDUDUKAN SEBAGAI PRODUK PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIK) DI KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Dukcapil/Vol. 3, No. 2/Desember 2015*.
- Gupta, N., Zurn, P., Diallo, K., & Dal Poz, M. R. (2003). Uses of population census data for monitoring geographical imbalance in the health workforce: Snapshots from three developing countries. *International Journal for Equity in Health*, 2, 1–12.

<https://doi.org/10.1186/1475-9276-2-1>

- Hutasoit, I. (2017). *Pengantar Ilmu Kependudukan.Pdf*.
- Ibrahim, N. R. M. S. M. W. (2023). Pelaksanaan PKH Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 1–23.
- Labolo Muhadam. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. In *Raja Grafindo Persada*.
- Manoppo, E. V., & Laoh, N. A. (2022). Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Rs-Rtlh Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Konstituen*, 4(1), 25–39. <https://doi.org/10.33701/jk.v4i1.2598>
- Pandjaitan, T. (2020). The Utilization of Population Data House for Development Programs Intervention of Family Planning Village. *Research on Humanities and Social Sciences*, 10(4), 35–41. <https://doi.org/10.7176/rhss/10-4-06>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Shahidi, F. V., Ramraj, C., Sod-Erdene, O., Hildebrand, V., & Siddiqi, A. (2019). The impact of social assistance programs on population health: A systematic review of research in high-income countries. *BMC Public Health*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6337-1>
- Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1). <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>
- Sumner, A., Hoy, C., & Ortiz-Juarez, E. (2020). Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty. *WIDER Working Paper 2020/43, April*. <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2020/800-9>
- Sundari, A., & Eriyanti, F. (2019). Pemanfaatan Bantuan GlobalHartanto, Benny, Ningrum Astriawati, Waris Wibowo, and Didik Sisdiyanto, ‘Pengenalan Teknologi Navigasi Bidang Maritim Melalui Virtual Outing Untuk Anak-Anak Jogjakarta Montessori School’, SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat . *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(3), 416–423. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/74%0Ahttps://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/download/74/67>
- Ummah, M. S. (2019). In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://sciotea.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI